



ANALISIS PENGARUH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA

Maria Agape Widya Prasetya¹, Princesca Luffitasari², Justi Sairo³, Birgitta Dian Saraswati^{4*}

¹ Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana : 222018018@student.uksw.edu

² Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana : 222018001@student.uksw.edu

³ Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana : 222017042@student.uksw.edu

⁴ Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana : birgitta.saraswati@uksw.edu

Abstrak

Ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah dalam perekonomian Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata maka pemerintah berupaya untuk menekan angka ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia. Lembaga keuangan mikro diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat miskin sehingga akan terwujud pemerataan pendapatan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh dari pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro (LKM), jumlah LKM dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian menggunakan teknik analisis regresi data panel pendekatan fixed effect model dengan periode pengamatan tahun 2019.1 sampai dengan 2020.12 pada 18 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM secara signifikan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan variabel IPM dan jumlah LKM terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan; Lembaga Keuangan Mikro; Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

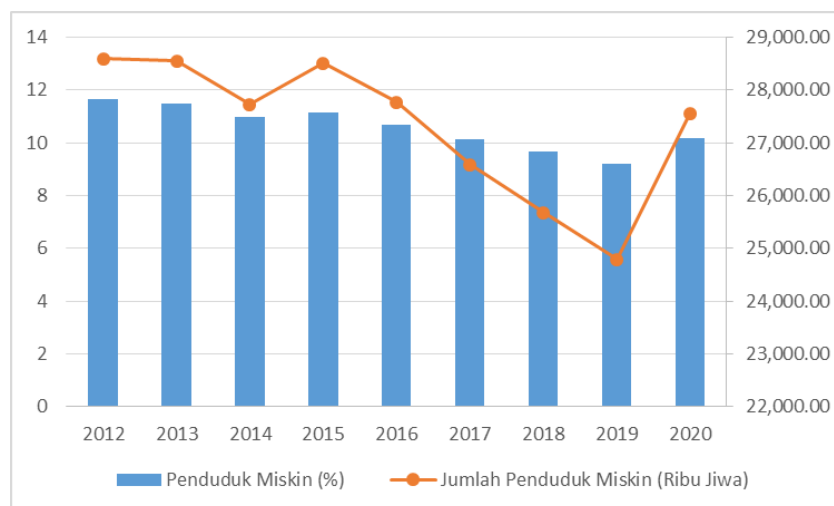
Income inequality is still a problem in the Indonesian economy. In order to realize the welfare of the people evenly, the government seeks to reduce the income inequality between provinces in Indonesia. The existence of microfinance institutions (MFIs) is expected to help the economy of the poor so that income distribution will be realized. This study aims to analyze the effect of loans disbursed by MFIs, the number of MFIs and the human development index (HDI) on income inequality in Indonesia. By using panel data regression analysis techniques with a fixed effect model approach with an observation period of 2019.1 to 2020.12 in 18 provinces in Indonesia, this study shows that the number of loans disbursed techniques by MFIs has a significant positive effect on income inequality in Indonesia, while the HDI variable and the number of MFIs have no effect on income inequality in Indonesia

Keywords: Income Inequality; MFI; microfinance institutions (MFIs); human development index

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah mendasar dalam perekonomian yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah masalah kemiskinan (Ramdani, 2015). Kemiskinan merupakan salah satu akar masalah yang menimbulkan masalah lain seperti kelaparan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang rendah. Indonesia terus berusaha mengentaskan kemiskinan karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunkan bahkan mengentaskan laju kemiskinan (Azizah et al., 2018). Adapun Pemerintah sebagai pembuat kebijakan sudah mengantisipasi naiknya jumlah masyarakat miskin dengan berbagai kebijakan, akan tetapi tetap saja tidak sepenuhnya efektif untuk memberantas kemiskinan. Berbagai macam kebijakan dan bantuan sudah Pemerintah berikan tetapi tetap saja tidak optimal dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Secara data jumlah penduduk miskin di Indonesia (dalam presentase) memang menurun, akan tetapi jika dilihat secara fakta dan kualitatif belum ada perubahan yang nyata dan signifikan.

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2012-2020

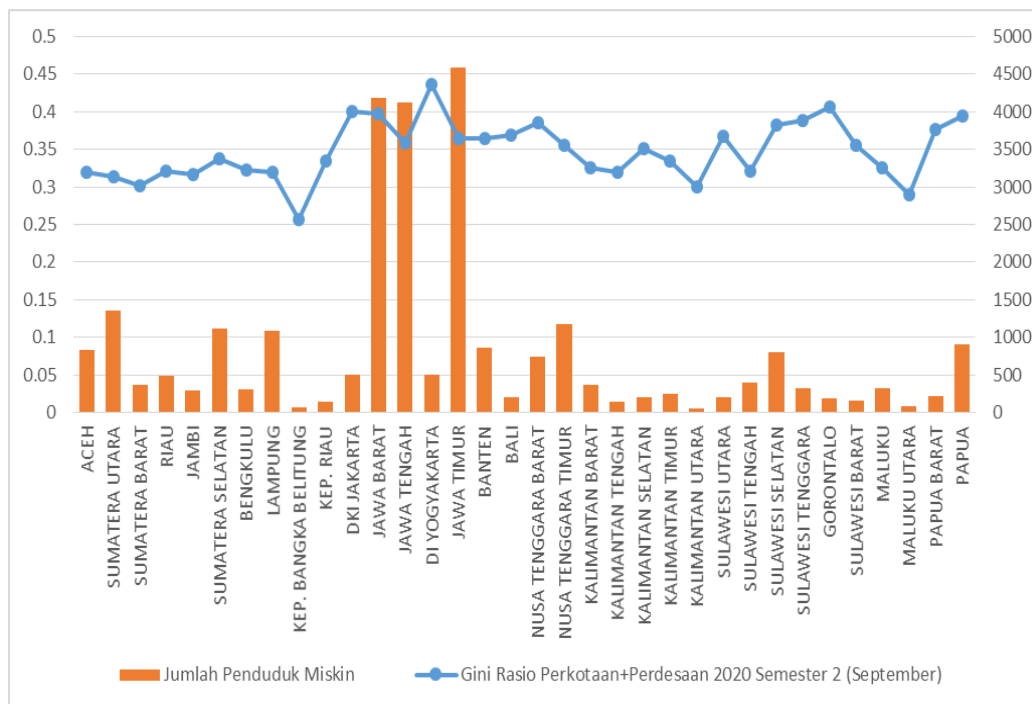


Sumber: *bps.go.id (data diolah), 2021*

Gambar 1 menggambarkan kondisi penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2012-2020 pada bulan September setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin sempat mengalami penurunan secara dinamis di tahun 2015-2019. Akan tetapi, mulai melonjak naik di tahun 2020 karena adanya pandemic COVID-19 yang menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat dan membuat semakin banyak masyarakat menengah menjadi miskin dan yang sudah miskin semakin menjadi miskin (Arnani, 2021).

Selain kemiskinan, hal yang masih menjadi sorotan terkait pembangunan ekonomi dan permasalahan ekonomi adalah ketimpangan pendapatan (Soelistyo, 2017). Ketimpangan pendapatan diartikan sebagai ketidakmerataan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah, sehingga tidak semua lapisan masyarakat menikmati pembangunan tersebut (Nuraini, 2009). Ketimpangan pendapatan ditunjukkan dengan nilai gini rasio. Indeks gini adalah suatu indeks untuk mengukur distribusi pendapatan dalam suatu wilayah dikatakan timpang atau tidak (Suhaeti, 2003). Dalam suatu wilayah jika indeks gini mendekati angka 1 berarti terjadi ketimpangan yang cukup lebar, dan begitu sebaliknya. Jika angka indeks gini menjauhi angka 1 berarti ketimpangan sangat kecil (BAPPEDA & BPS, 2017). Idealnya, jika jumlah penduduk miskin berkurang maka indeks gini juga berkurang karena jumlah penduduk miskin berkurang menandakan kesejahteraan masyarakat meningkat dan ketimpangan pendapatan antar masyarakat menjauhi 1 atau berkurang.

Gambar 2. Gini Rasio dan Jumlah Penduduk Miskin Per Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2020



Sumber: bps.go.id (data diolah), 2021



Gambar 2 di atas, Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki indeks gini sebesar 0.437 dan jumlah penduduk miskin sebesar 503,140 jiwa yang tergolong rendah atau sedikit jika dibandingkan dengan daerah lain. Jika melihat secara provinsi atau secara global, nilai indeks gini tertinggi ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, dan DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketidakmerataan pendapatan di Indonesia masih sangat tinggi. Pemerintah sedianya sudah berupaya untuk mengurangi angka indeks gini dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan memperluas kesempatan kerja, mempermudah dalam urusan kepemilikan aset, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan investasi (Chandra, 2017).

Ketimpangan pendapatan di Perancis terjadi secara kebetulan yang sebagaian besar dipengaruhi oleh fenomena pendapatan modal (Piketty, 2003). Menurut penelitian Prasetyo *et al.* (2013) dan Nangarumba (2015), pertumbuhan pendapatan per kapita, jumlah pekerja sektor industri, sektor agrikultur dan sektor jasa berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu ketimpangan pendapatan di United States dipengaruhi juga oleh keragaman ras dan budaya di US dan dari sisi moneter kebijakan menurunkan suku bunga dapat menurunkan ketimpangan pendapatan juga (Liu *et al.*, 2017 dan Putri *et al.*, 2019).

Selanjutnya penelitian Lee *et al.* (2013), Putri *et al.* (2015) dan Dwiputra (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, produktivitas, investasi, pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah, jumlah populasi lansia dan IPM mempunyai pengaruh yang signifikan baik positif maupun negative terhadap ketimpangan penduduk di Indonesia. IPM terbukti berpengaruh secara negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, Dimana semakin tinggi tingkat IPM maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan meningkatkan IPM. Menurut penelitian Solekhah (2018) IPM dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan pendapatan juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengangguran, migrasi dan kemiskinan (Hindun *et al.*, 2019; Oksamulya, 2020)

Pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan pendapatan masih menjadi hal atau isu yang sering kali dibahas dalam pemerintahan baik tingkat daerah maupun nasional (Arif *et al.*, 2019). Penanganan serius sangat diperlukan dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih baik. Selain peran pemerintah, peran kelembagaan juga diperlukan agar keberhasilan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat terjadi (Janiar, 2017). Salah satu lembaga keuangan yang kita kenal dengan Lembaga Keuangan



Mikro (LKM) dipercaya dapat mengentaskan kemiskinan dan mengatasi permasalahan modal oleh Pemerintah Indonesia (Mahardhi et al., 2019).

Selaras dengan cara pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dengan membuka lapangan kerja yang luas, dibukanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi jawaban yang tepat karena UMKM terbukti dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa mengurangi angka pengangguran (Sarfiyah et al., 2019). UMKM mampu menjadi pilar penyokong dalam perekonomian Indonesia mudahnya dalam mengimplementasikan inovasi dan teknologi yang *up to date* sehingga memungkinkan untuk dapat terus berkembang. Dilansir dari Admin (2009), salah satu kendala dari perkembangan usaha UMKM di Indonesia adalah pada pemenuhan modal. Keterbatasan modal ini secara nyata bisa menjadi penghambat dalam keberlangsung hidup UMKM. Padahal, dibukanya usaha baru oleh masyarakat kecil atau sering dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah salah satu langkah strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan (Sarfiyah et al., 2019). Disinilah peran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk membantu masyarakat dalam hal modal untuk membuka usaha dan mengatasi kendala kekurangan modal (Suhartini, 2014).

Di Indonesia keberadaan LKM tumbuh dengan cepat yang terlihat dari jumlah LKM yang ada di seluruh Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2020. Dimana jumlah LKM di tahun 2020 sebanyak 228 meningkat dibandingkan jumlah LKM di tahun 2019 yang hanya sebanyak 204. Selain itu pinjaman yang disalurkan oleh LKM di tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Dimana jumlah pinjaman yang disalurkan LKM pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.6159 juta menjadi sebesar Rp749,42 juta di tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 21,68 persen. Keberadaan LKM dan peran LKM dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dapat menjadi solusi dari masalah permodalan dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan juga (Janiar, 2017).

Adapun alasan LKM dapat mengentaskan kemiskinan karena LKM dibentuk dari lapisan masyarakat bawah dan bukan dari perangkat perencana pemerintah, melainkan dibentuk oleh tenaga profesional (Aspiranti, 2009). Selain itu, penelitian Lasmiatun (2017) juga menyatakan bahwa LKM berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberi pinjaman modal bagi usaha kecil yang sedang merintis. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Sarfiyah et al. (2019) yang menyatakan bahwa UMKM berperan penting dalam perekonomian karena keberadaannya yang cukup dominan



dalam masyarakat. Penelitian Kamilah (2019) menyatakan bahwa di Kota Medan, LKM Syariah yang ada di bawah OJK terbukti dapat menurunkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Akan tetapi, hal yang menjadi kendala LKM dalam melakukan tugasnya untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan angka ketimpangan pendapatan adalah jauhnya jarak antara institusi dengan nasabah dan nasabah menyimpan di bank atau melakukan kredit hanya saat sedang butuh saja dan bukan sebagai kebiasaan. Sehingga peran LKM dalam mengentaskan kemiskinan disini kurang terlihat (Alamsyah, 1999). Menurut Aspiranti LKM mempunyai suatu kekuatan besar yaitu dapat beradaptasi dan mampu menemukan cara dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin bukanlah masyarakat yang membutuhkan sumbangan, melainkan nasabah potensial yang membutuhkan jasa pelayanan keuangan. Peran LKM dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan pun tidak terjadi di semua provinsi di Indonesia atau dengan kata lain tidak sepenuhnya efektif (Janiar, 2017). Penelitian Arif *et al.* (2019) pun menyatakan bahwa kredit mikro hanya mampu mengentaskan kemiskinan dan tidak kurang mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Selain itu, jika ditinjau melalui inklusi keuangan, LKM memiliki hubungan yang negative terhadap ketimpangan pendapatan (Muslikhah, 2020).

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, maka penelitian bertujuan untuk melihat peran LKM dalam mengentaskan kemiskinan atau menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia dengan memakai data jumlah LKM, saldo yang dipinjamkan, indeks gini, dan IPM Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai saran kepada pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan apakah cukup dengan mengembangkan LKM saja atau dengan cara lain.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro diartikan sebagai lembaga keuangan yang dibentuk dengan tujuan khusus untuk memberikan jasa dalam hal pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Baskara, 2013).



2.2 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan didefinisikan sebagai perbedaan pendapatan antara masyarakat atau perbedaan pendapatan antara daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang perbedaan pendapatan tersebut maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Adapun beberapa ukuran ketimpangan yang sering digunakan antara lain: Indeks Gini, Indeks Theil dan ukuran ketimpangan dari Bank Dunia. Indeks Gini pun dipilih sebagai indikator ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini. Indeks Gini adalah satu indikator atau ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ukuran ketimpangan agregat yang nilainya berkisar antara nol dan satu. Nilai Indeks Gini nol artinya tidak ada ketimpangan (pemerataan sempurna) sedangkan nilai satu artinya ketimpangan sempurna (Damanik et al., 2018)

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengindikasikan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Hidup sehat dan umur panjang, Pengetahuan, dan Standar hidup layak.

2.4 Hubungan Antara Lembaga Keuangan Mikro dengan Ketimpangan Pendapatan

Penelitian Janiar (2017) menyatakan bahwa BPR atau Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu dari 98% faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian Lacalle-Calderon *et al.* (2018) menyatakan hal yang serupa. Dalam lingkup daerah, LKM syariah terbukti dapat mengatasi masalah ketimpangan dan distirbusi atau pemerataan pendapatan di Kota Medan dan Kabupaten Tasiklamalaya (Kamilah & Nst, 2019; Marino & Gunawan, 2020) Akan tetapi, jika ditinjau dengan inklusi keuangan, penelitian Muslikhah & Utami (2020) menyatakan bahwa hubungannya negative. Penelitian Arif *et al.* (2019) pun menyatakan bahwa kredit mikro hanya mampu mengentaskan kemiskinan dan tidak kurang mampu menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah,

H1: Lembaga Keuangan Mikro berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan

2.5 Hubungan Antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan

Penelitian yang dilakukan oleh Putri *et al.* (2015) dan Dwiputra (2018) menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan negative terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratowo (2011) pun menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh secara negative terhadap IPM. Akan tetapi, penelitian Muhammad Arif & Wicaksana (2017) menyatakan bahwa di Jawa Timur, IPM berpengaruh secara positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan meningkatnya IPM mengindikasikan kualitas sumber daya meningkat. Secara teori, peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan pendapatan per kapita sehingga akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, penulis mengajukan hipotesis dalam penelitian ini,

H2: Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis menggunakan alat analisis yang dipilih oleh penulis (Lestari, 2017). Pada penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara khusus data yang digunakan adalah merupakan data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu periode 2019.1 sampai dengan 2020.12 dan *cross section* 18 provinsi di Indonesia. Pemilihan 18 provinsi di Indonesia didasarkan pada ketersediaan data yang dipublikasikan oleh OJK.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Konsep	Indikator Empiris	Sumber
1.	Ketimpangan Pendapatan	Diukur dengan indikator Indeks Gini. Adapun rumus rasio gini: $GR = 1 - \sum f_i [Y_i + Y_{i-1}]$ Dimana: f_i adalah jumlah persen penerima pendapatan kelas i , dan Y_i adalah jumlah kumulatif (%) pendapatan kelas i .	BPS
2.	Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah LKM dan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM (bruto)	OJK
3.	Indeks Pembangunan Manusia	IPM yang diukur menggunakan rata-rata ukur geometri dengan rumus : $\sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	BPS



3.1 Teknik Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat analisis regresi data panel. Data panel adalah sebuah data yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section* atau dengan kata lain pengujian data yang terdiri dari banyak tempat dan dengan runtut waktu yang berbeda pula (Pangestika, 2015). Adapun model data panel dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1it} + \alpha_2 X_{2it} + \alpha_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} : Ketimpangan pendapatan

α : konstanta

X_{1it} : jumlah lembaga keuangan mikro

X_{2it} : Jumlah pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan mikro

X_{3it} : indeks pembangunan manusia

ε_{it} = variabel gangguan (*error term*)

Terdapat tiga pendekatan dalam regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (B. H. Baltagi, 2005). Untuk menentukan model yang tepat maka dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier (B. Baltagi, 2008). Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier, diperoleh bahwa model yang paling tepat dalam mengestimasi pengaruh jumlah LKM, jumlah pinjaman yang dipinjamkan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *model Fixed Effect Model*.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan regresi data panel, terdapat beberapa langkah yang harus diikuti dan jika semua langkah berhasil lolos maka data dapat selanjutnya diolah. Langkah pertama yaitu dengan melakukan penentuan model estimasi regresi data panel. Penentuan model estimasi data panel terdiri dari tiga jenis pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Sebelumnya dilakukan uji chow, uji lagrange multiplier, dan uji hausman untuk menentukan model mana yang paling cocok untuk regresi data panel.

Dalam penelitian ini dipakai model estimasi *fixed effect model* dengan menggunakan teknik variabel *dummy*. Model estimasi *fixed effect model* dipilih karena berdasarkan hasil uji chow, uji

hausman, dan uji lagrange multiplier hasilnya adalah memilih *fixed effect model*. Adapun hasil regresi data panel yang menggunakan metode *fixed effect model* tergambar dalam gambar 4.1 di bawah ini,

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	t-stat	Probability
Jumlah LKM	1.693923	0.0961
Jumlah pinjaman yang disalurkan LKM	2.521312	0.0147
IPM	-1.685383	0.0978
Adj. R-squared		0.982399
F-statistic	170.5924	0.00000

Sumber: Data Diolah (2021)

Tabel 1. di atas adalah hasil regresi data panel yang menggunakan metode *fixed effect model*. Nilai R square dari hasil regresi tersebut adalah 0.98 atau 98%. Hal ini menyatakan bahwa secara simultan atau bersama-sama, variabel LKM yang terdiri dari jumlah LKM dan jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM, serta variabel IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan sebesar 98% dan 2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan nilai *F-statistic* menunjukkan bahwa variabel LKM dan variabel IPM secara bersama-sama mempengaruhi variabel ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Berdasarkan hasil regresi panel dengan menggunakan metode *fixed model effect* pada Tabel 1, di dapatkan hasil bahwa jumlah LKM terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Muslikhah & Utami (2020) yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan tidak terpengaruh oleh adanya peningkatan akses masyarakat pada lembaga keuangan. Hal ini diduga karena keberadaan LKM hanya terpusat pada provinsi atau pulau-pulau yang memiliki kondisi ekonomi sangat padat saja. Berdasarkan data dari OJK, jumlah LKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 123 unit di tahun 2020, sedangkan di Provinsi Aceh hanya terdapat 2 unit dan Provinsi Kalimantan Selatan hanya terdapat 1 unit pada tahun yang sama (OJK, 2021). Hal ini menandakan belum ratanya jumlah LKM yang ada di Indonesia dan hanya berpusat pada provinsi atau kota tertentu saja. Penambahan jumlah LKM tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan karena seringkali penambahan jumlah LKM tidak disertai dengan penambahan jumlah dana yang siap dipinjamkan, sehingga pembukaan cabang baru LKM dinilai kurang efektif.



Sedangkan, jumlah dana yang dipinjamkan oleh LKM terbukti memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan dengan ketimpangan pendapatan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lasmiatun (2017) yang menyatakan bahwa salah satu kekurangan dari adanya LKM sebagai lembaga penyedia kredit modal adalah tingginya penetapan bunga pinjaman. Tingginya bunga pinjaman pada LKM menyebabkan hanya kelompok masyarakat tertentu saja khususnya masyarakat berpendapatan tinggi yang sanggup membayar bunga atas pinjaman tersebut. Kondisi ini yang membuat semakin banyak jumlah dana yang disalurkan oleh LKM justru semakin memperbesar ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil penelitian ini pun selaras dengan penelitian Arif *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa LKM hanya mampu mengurangi angka kemiskinan saja dan tidak mampu dalam mengurangi angka ketimpangan pendapatan di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan LKM yang seharusnya bertujuan membantu perekonomian masyarakat miskin justru tidak tercapai. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah dalam merancang kebijakan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin untuk mengakses LKM.

Tabel 1 juga menunjukkan bahwa IPM terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra (2018) dan (Pratowo, 2011) yang membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia mempengaruhi ketimpangan pendapatan dengan arah negatif. Nilai IPM terbukti tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia diduga karena terdapat ketimpangan kualitas manusia antar provinsi di Indonesia. Perbedaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan antar provinsi dimana provinsi yang berada di Pulau Jawa relatif memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai dibanding provinsi-provinsi yang berada di luar Pulau Jawa. Hal ini yang diduga menjadi penyebab IPM tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk dapat menjamin pemerataan fasilitas sarana prasarana kesehatan dan pendidikan di setiap provinsi di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan:

- secara simultan jumlah LKM, jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM, dan IPM mempengaruhi secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

- Jumlah pinjaman yang disalurkan oleh LKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia
- Jumlah LKM dan IPM terbukti tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia

Implikasi kebijakan atas temuan tersebut adalah:

- Pemerintah perlu mengupayakan pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan antar provinsi di Indonesia, sehingga akan berdampak pada peningkatan IPM secara merata dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan pada daerah yang relatif tertinggal.
- Perlu dirancang kebijakan yang memudahkan masyarakat miskin untuk dapat akses lembaga keuangan formal sehingga keberadaan LKM ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan membantu masyarakat miskin, benar-benar bisa dimanfaatkan oleh golongan masyarakat miskin.

REFERENSI

Admin. (2009). Modal jadi Kendala UMKM. *Bbc.Com*.

Adnyana, M. O., & Suhaeti, R. N. (2003). Penerapan Indeks Gini Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Pendapatan Dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan Di Wilayah Jawa Dan Bali. *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 3(2), 1–13.

Alamsyah, H. (1999). Dari Krisis Nilai Tukar, Alternatif Penjamin Simpanan, Peran Lembaga Keuanga Mikro hingga Money Laundering: Overview. *Buletin of Monetary Economics and Banking*, 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bemp.v1i4.182>

Arif, Mahardhi, Ismail, M., & Santoso, D. B. (2019). Does Microfinance Affect Poverty Reduction and Inequality in Indonesia? *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(4), 122–125.

Arif, Muhammad, & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor- faktor yang Mempengaruhinya. *University Research Colloquium*, 323–328.

Arnani, M. (2021). Angka Kemiskinan Naik, Ini Data per Provinsi. *Kompas.Com*.

Aspiranti, T. (2009). Lembaga Keuangan Mikro dan Kemiskinan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/performa.v6i2.6079>

Azizah, E. W., Sudarti, & Kusuma, H. (2018). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 167–180.



- Baltagi, B. (2008). *Econometric Analysis of panel Data* (J. Wiley & Sons (eds.)).
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- BAPPEDA, & BPS. (2017). *Analisis Ketimpangan Pengeluaran Penduduk (Indeks Gini) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2016*.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(2), 114–125.
- Chandra, A. A. (2017, September). Begini Cara Pemerintah Atasi Ketimpangan. *Finance.Detik.Com*.
- Damanik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi*. 7(1), 15–25.
- Dwiputra, R. M. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (Periode 2011-2016)*. Universitas Brawijaya.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(3), 250–265. <https://doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>
- Janiar, L. V., & Soelistyo, A. (2017). Analisis Penguatan Peran Kelembagaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Ilmu Ekonomi*, 1(3), 352–364.
- Kamilah, K., & Nst, A. I. L. (2019). Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Distribusi Pendapatan di Kota Medan. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...*, 6(1).
- Lacalle-Calderon, M., Larrú, J. M., Garrido, S. R., & Perez-Trujillo, M. (2018). Microfinance and Income Inequality: New Macrolevel Evidence. *Review of Development Economics*, 23(2), 860–876. <https://doi.org/10.1111/rode.12573>
- Lasmiatun. (2017). Peran dan Kebijakan Pemerintah Melalui LKM/ LKMS untuk Menciptakan Kesejahteraan dan Keadilan Distributif. *Dimensi*, 10(2), 36–48.
- Lee, H.-Y., Kim, J., & Cin, B. C. (2013). Empirical Analysis on the Determinants of Income Inequality in Korea. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 53, 95–110.
- Lestari, R. P. (2017). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, dan Produk Domestik Regional bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Liu, B., Wei, Y. D., & Simon, C. A. (2017). Social Capital, Race, and Income Inequality in the United States. *Sustainability (Switzerland)*, 9(2). <https://doi.org/10.3390/su9020248>
- Marino, W. S., & Gunawan, G. G. (2020). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga



Kuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 121–132. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/jibm.v4i2.4222>

Muslikhah, A. S., & Utami, E. D. (2020). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019*(1), 738–748. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.102>

Nangarumba, M. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jesp*, 7(2), 9–26.

Nuraini, I. (2009). Potensi dan Ketimpangan Ekonomi Antar Kecamatan di kabupaten Pasuruan. *Jurnal Media Trend*, 4(1), 21–44.

OJK. (2021). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. OJK.Go.Id.

Oksamulya, A., & Anis, A. (2020). Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 141–150.

Pangestika, S. (2015). Analisis Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), Dan Random Effect Model (REM). In *Unnes Journal*. Universitas Negeri Semarang.

Piketty, T. (2003). Income Inequality in France, 1901-1998. *Journal of Political Economy*, 111(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.1086/376955>

Prasetyo, B. A., Priyarsono, D. S., & Mulatsih, S. (2013). Infrastructure, Economic Growth and Inequality in Indonesia Land Borders. *Economic Journal of Emerging Markets*, 5(2), 99–108.

Pratowo, N. I. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia*, 15–31.

Putri, M. S., & Wasiaturrahma, W. (2019). Dampak shock kebijakan moneter terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 243–258. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.5133>

Putri, Y., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6).

Ramdani, M. (2015). Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1), 58–64. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14803>

S, Z. P., Palisuri, P., & Chahyono. (2017). Analisis Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu. *Jurnal Riset Edisi XIV*, 3(3), 50–66.

Sarfiah, S., Atmaja, H., & Verawati, D. (2019). UMKM sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.



Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(2), 1–189. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.1952>

Suhartini, A. M., & Yuta, R. (2014). Keterkaitan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 137–144.